



## MANAJEMEN BUDAYA SEKOLAH SMP NEGERI 1 KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

Pono Raharjo✉

Prodi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2013

Disetujui Februari 2013

Dipublikasikan Juni 2013

*Keywords:*

Planning

Actuating

Controlling of

School Culture

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam perencanaan Program Budaya Sekolah; pelaksanaan Rencana Kerja Budaya Sekolah; pengawasan Budaya Sekolah, yang berfokus pada Manajemen Budaya Sekolah. Peneliti menggunakan metode deskriptif kaulitatif. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, peneliti menggunakan sample purposive dan menggunakan tehnik penelitian sampel bola salju atau snowball sample. Dari hasil penelitan yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: (a) SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan telah memiliki prosedur yang baku dalam pengelolaan budaya sekolah, (b) dalam setiap penyusunan rencana program budaya sekolah, selalu melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk siswa; (c) sebelum pelaksanaan program dijalankan, pihak pengelola budaya sekolah memberikan sosialisasi yang cukup kepada seluruh siswa; dan (d) dalam pengawasan budaya sekolah, dijalankan secara berlapis dari guru, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah.

### Abstract

*This study was conducted because of SMP Negeri 1 Kajen Pekalongan has established standard procedures and the management of the school culture. The research was conducted with the hopeto provide input and advice toother schools in the district Pekalongan in order to improve thequality of education. This study uses descriptive kaulitatif. From the results of research conducted, obtained the following results: (a) SMP Negeri 1 Kajen Pekalongan have standard procedures in the management of the school culture, (b) In any school cultural program planning, always in volves the entireschool community, including students, (c) before the program starts, the manager of the school culture providead equate socialization to all students; (d) under the supervision of the school culture, executedin layer sof teachers, vice-principals, principals, school committees and school superintendent.*

## Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan: kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia kerja, stakeholder, pembangunan fisik gedung, maupun pemberian bantuan operasional sekolah; serta penyempurnaan profesionalisme manajemen pendidikan yang masih rendah.

Agar mutu pendidikan terjaga dan proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

Dari delapan Standar Pendidikan Nasional tersebut, penulis berminat untuk mengkaji/menganalisis tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, yang oleh pemerintah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007, tertanggal 23 Mei 2007 yang berisi tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tersebut, berisi tentang: a) Perencanaan Program; b). Pelaksanaan Rencana Kerja; c). Pengawasan dan evaluasi; d). Kepemimpinan Sekolah e). Sistem Informasi Manajemen; dan f). Penilaian Khusus. Adapun pada Pelaksanaan Rencana Kerja dijabarkan menjadi sepuluh materi kegiatan, meliputi: 1. Pedoman Sekolah ; 2. Struktur Organisasi Sekolah; 3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah; 4. Bidang Kesiswaan; 5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran; 6. Bidang Sarana dan Prasarana; 7. Bidang Keuangan dan Pembiayaan; 8. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 9. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah; 10. Bidang Budaya dan Lingkungan Sekolah. Mengingat banyaknya cakupan materi pada Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan maka penelitian ini hanya mengkaji/menganalisis secara mendalam pada: a) Perencanaan Program Budaya Sekolah;

b). Pelaksanaan Rencana Kerja Budaya Sekolah; c). Pengawasan Budaya Sekolah, yang berfokus pada Manajemen Budaya Sekolah, yang mengambil latar/setting penelitian di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan.

Dari hasil studi pendahuluan dapat disimpulkan hal-hal yang menarik yang dimiliki SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan yang berkaitan dengan Budaya Sekolah yang terdapat pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, agar tercipta suasana, iklim, dan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dan efisien adalah sebagai berikut: 1) Budaya jabat-tangan; 2) Budaya Bersih Jumat Pagi atau BERJUMPA; 3) Budaya berkomunikasi dengan bahasa Jawa dan bahasa Inggris dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Hal menarik lain yang menjadi alasan penulis meneliti Budaya Sekolah adalah; 1) dalam penyusunan perencanaan siswa dilibatkan secara penuh; 2) pengelola sekolah mempunyai prosedur-prosedur yang baik dan baku; 3) pengelola sekolah mempunyai sistem manajemen budaya sekolah yang sangat baik sehingga seluruh program budaya sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif analitik. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan budaya sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan. Lofland dan Lofland dalam Moleong (2010:157) menegaskan bahwa "karakteristik data primer adalah dalam bentuk kata-kata atau ucapan-ucapan lisan dan perilaku manusia. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer." Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan prosedur *sampling purposive*, di mana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan diobservasi atau diwawancarai. Dengan teknik *sampling purposive*, maka ditetapkan informan sebagai sumber data dalam penelitian adalah kepala sekolah, guru, tata usaha,

karyawan, komite sekolah, pengawas sekolah, dan siswa. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis teknik yang dalam mengumpulkan data, diantaranya: 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi atau data-data. Keabsahan data adalah bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Dalam penelitian ini penulis memilih dengan proses triangulasi. Adapun jenis-jenis metode triangulasi, yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: a) triangulasi data; b) triangulasi teori; c) triangulasi metode. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Dan dalam tehnik analisis data, digunakan acuan teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:21-23) menyebutkan bahwa: "Analisis deskriptif dilaksanakan melalui 4 (empat) alur kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Empat alur kegiatan itu adalah: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) kesimpulan atau verifikasi. Selain itu juga berupaya menganalisis atau membandingkan dengan teori-teori yang sudah ada. Kalau sudah sesuai dengan teori yang ada maka dinamakan ada kesesuaian. Sedangkan kalau ada perbedaan dan sudah dilakukan pengecekan berulang-ulang maka menimbulkan teori baru.

## Hasil dan Pembahasan

### Prosedur Perencanaan Budaya Sekolah

Langkah pertama dalam Manajemen Budaya Sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan adalah adanya prosedur perencanaan budaya sekolah, langkah-langkah dalam tahap perencanaan budaya sekolah, penulis memperoleh informasi dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang hasilnya dapat dipaparkan sebagai berikut: (a) kepala sekolah membentuk panitia penyusun rencana program, yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang: kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas serta komite sekolah; (b) panitia merancang program tahunan berdasarkan masukan dari siswa, guru dan staf tata usaha yang terkait dengan bidang masing-masing; (c) setelah rencana program tersusun, kemudian pada awal tahun pelajaran baru, draf rencana program tersebut "dibedah" dalam forum rapat dewan guru dan staf tata usaha; (d) setelah program-program tersebut disetujui semua pihak,

selanjutnya diadakan rapat pleno penyusunan rencana program dengan pengurus komite sekolah; (e) selanjutnya rencana program dimintakan persetujuan kepala sekolah dan Ketua komite sekolah; (f) selanjutnya dimintakan rekomendasi kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pekalongan; dan (g) rencana program menjadi dokumen program sekolah.

Dari deskripsi di atas dapat dikemukakan bahwa dalam penyusunan perencanaan budaya sekolah, pihak pengelola SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah berusaha menempuh prosedur yang seharusnya dan melibatkan seluruh warga sekolah seperti: wakil kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa serta komite sekolah. Dan penyusunan perencanaan budaya sekolah juga disampaikan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten Pekalongan. Perencanaan budaya sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan temuannya, Haryati (2011:309), di mana penyusunan perencanaan merupakan langkah awal dalam sebuah pengelolaan dalam penyusunan sebuah program kerja sekolah. Dalam perencanaan penyusunan rencana sekolah, pengelola melibatkan seluruh warga sekolah, seperti: kepala sekolah/wakil kepala sekolah, guru, penanggung jawab program, dan komite sekolah. Dalam penyusunan rencana program sekolah, pengelola sekolah menempuh beberapa tahapan sehingga program sekolah dapat tersusun dengan lengkap. Dan pada pada tahap akhir penyusunan, program rencana kegiatan sekolah disahkan oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Peran dan fungsi komite dalam penyusunan program budaya sekolah di pengelola SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan baik, di mana komite sekolah tidak hanya disodori program yang sudah diplenokan untuk dimintakan tanda tangan sebagai bukti pengesahan anggaran tetapi komite sekolah ikut serta di dalam rapat pleno penyusunan program, dan komite sekolah dapat menolak atau tidak menyetujui program sekolah kalau dipandang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan komite sekolah. Hal ini sudah sesuai dengan fungsi dan peran komite sekolah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002.

### Pelaksanaan Budaya Sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan Prosedur Pelaksanaan Budaya Jabat Tangan

Berdasarkan observasi dan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah yang dipertegas oleh Noor Harjanto, selaku wakil kepala sekolah

bidang kesiswaan dan diperkuat oleh Heksa Juli-an S.D., selaku ketua OSIS juga diperkuat oleh Ircham Junaedi, selaku ketua komite sekolah memberikan gambaran tentang prosedur pelaksanaan budaya 'Jabat Tangan' yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sebagai berikut: (a) setelah mendapat surat tugas, wakil kepala bidang kurikulum menyusun program kerja tentang maksud dan tujuan diadakannya program, manfaat, tata cara, sanksi, dsb., sambil meminta masukan dari beberapa siswa; (b) setelah kepala sekolah menyetujui rencana program tersebut, wakasek bidang kurikulum menyiapkan diri untuk mempresentasikan saat rapat pleno penyusunan program; (c) kepala sekolah mengadakan dan memimpin rapat pleno penyusunan program; (d) di dalam rapat pleno, wakasek bidang kurikulum mempresentasikan programnya untuk mendapatkan masukan dari peserta rapat, di antaranya: wakasek-wakasek yang lain, guru-guru, dan karyawan; (f) setelah program direvisi sedemikian rupa, wakasek bidang kurikulum menyerahkan program kerja ke kepala sekolah untuk minta tanda tangan sebagai tanda persetujuan; (g) setelah kepala sekolah setuju program kerja, kemudian wakasek bidang kurikulum meminta persetujuan komite sekolah; (h) setelah kepala sekolah dan komite sekolah menyetujui, maka tinggal menunggu waktu pelaksanaan; (i) sebelum program dilaksanakan, guru wali kelas mengadakan sosialisasi ke seluruh siswa, (j) setelah selesai pelaksanaan program, dan setiap akhir pelaksanaan, wakasek kurikulum meminta laporan dari guru piket dan wali kelas sebagai bahan evaluasi; (k) setelah evaluasi selesai, wakasek bidang kurikulum menyusun laporan pertanggungjawaban yang kemudian laporan tersebut diserahkan ke kepala sekolah.

Pelaksanaan budaya jabat tangan di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan lebih baik jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip penyusunan program kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2008: 6) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja rintisan SBI salah satunya adalah "disusun bersama oleh warga sekolah yang mencakup kepala sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah. karena penyusunan program budaya jabat tangan para peserta didik juga dilibatkan sehingga para peserta didik merasa ikut bertanggung jawab menyukseskan program budaya tersebut.

Pelaksanaan budaya jabat tangan di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan Permendiknas nomor 19 tahun 2007 dan panduan BOS (2011:15-16) karena prosedur

budaya jabat tangan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan, seperti: (a) setiap ada kegiatan maka petugas penanggung jawab kegiatan harus memiliki surat tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; (b) setelah memperoleh surat tugas, penanggung jawab kegiatan membuat proposal atau rencana kerja; (c) dengan dibantu petugas yang lain, penanggung jawab kegiatan melaksanakan program; (d) setelah selesai melaksanakan program, penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban.

#### **Prosedur Pelaksanaan Budaya Bersih Jumat Pagi atau "BERJUMPA"**

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan budaya bersih Jumat pagi atau "BERJUMPA" penulis menghimpun informasi dari kepala sekolah, Haryadi selaku waka sarana prasarana, Heksa Julianselaku ketua OSIS, Ircham Junaedi selaku ketua komite sekolah yang menyimpulkan bahwa: (a) setelah mendapat surat tugas, wakil kepala bidang sarpras menyusun program kerja sambil meminta masukan dari beberapa siswa; (b) kemudian wakasek sarpras menyerahkan ke kepala sekolah untuk mendapatkan masukan dan persetujuan; (c) setelah kepala sekolah menyetujui rencana program tersebut, wakasek bidang sarpras menyiapkan diri untuk mempresentasikan saat rapat pleno penyusunan program; (d) di dalam rapat pleno, wakasek bidang sarpras mempresentasikan programnya untuk mendapatkan masukan dari peserta rapat; (e) setelah mendapatkan masukan-masukan dari peserta rapat pleno, kemudian wakasek sarpras menyempurnakan programnya; (f) setelah program direvisi sedemikian rupa, wakasek bidang sarpras menyerahkan program kerja ke kepala sekolah dan komite sekolah untuk minta tanda tangan sebagai tanda persetujuan; (g) setelah kepala sekolah dan komite sekolah menyetujui, maka tinggal menunggu waktu pelaksanaan; (h) sebelum program dilaksanakan, guru wali kelas mengadakan sosialisasi ke seluruh siswa, (i) setiap akhir pelaksanaan, wakasek sarpras meminta laporan dari guru piket dan wali kelas sebagai bahan evaluasi; (j) wakasek bidang sarpras menyusun laporan pertanggungjawaban yang kemudian laporan tersebut diserahkan ke kepala sekolah.

Dari deskripsi di atas dapat penulis sampaikan bahwa dalam prosedur pelaksanaan budaya bersih Jumat pagi atau "BERJUMPA", pengelola SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan melibatkan seluruh warga sekolah. Hal ini nampak ketika wakil kepala sekolah menyusun rencana program sekolah, penyusunan ini akan mendapatkan masukan dan ide-ide baru dari warga se-

kolah lainnya, seperti: kepala sekolah, wakasek lainnya, guru dan karyawan, komite sekolah, bahkan para siswa yang akan menjadi objek sekaligus subjek pelaksanaan prosedur pelaksanaan budaya bersih Jumat pagi atau “BERJUMPA” juga dilibatkan. Dengan demikian program budaya bersih Jumat pagi atau “BERJUMPA” ini akan menjadi program yang lebih baik.

Pelaksanaan budaya Bersih Jumat Pagi atau “BERJUMPA” di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan lebih baik jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip penyusunan program kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2008:6) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja rintisan SBI salah satunya adalah “disusun bersama oleh warga sekolah yang mencakup kepala sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah. karena penyusunan program budaya Bersih Jumat Pagi atau “BERJUMPA” para peserta didik juga dilibatkan sehingga para peserta didik merasa ikut bertanggung jawab menyukseskan program budaya tersebut sesuai dengan motto Kabupaten Pekalongan sebagai kota SANTRI (Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah). Pelaksanaan budaya Bersih Jumat Pagi atau “BERJUMPA” di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan panduan BOS (2011:15-16) karena prosedur budaya Bersih Jumat Pagi atau “BERJUMPA” juga melaksanakan kegiatan-kegiatan, seperti: 1) setiap ada kegiatan maka petugas penanggung jawab kegiatan harus memiliki surat tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; 2) setelah memperoleh surat tugas, penanggung jawab kegiatan membuat proposal atau rencana kerja; 3) dengan dibantu petugas yang lain, penanggung jawab kegiatan melaksanakan program; 4) setelah selesai melaksanakan program, penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban; 5) laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh minimal 2 (dua) pejabat di atasnya.

#### **Pengawasan Budaya Sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan**

Data tentang prosedur pengawasan budaya sekolah yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan dapat dihipunkan dari informan Haryadi, selaku guru bidang studi yang diperkuat oleh Noor Harjanto selaku wakasek, Pramudarno selaku kepala sekolah, Kelik Suwarno selaku pengawas sekolah yang dapat disimpulkan bahwa prosedur pengawasan budaya yang diselenggarakan SMP Negeri 1 Kajen Pekalongan adalah sebagai berikut: (a) guru baik guru wali kelas, guru piket, guru bidang studi,

maupun guru BP melakukan pencatatan sebagai bukti adanya pelaksanaan budaya sekolah; (b) catatan-catatan tersebut diserahkan ke wakil kepala sekolah kemudian wakil kepala sekolah menyusun catatan tersebut menjadi laporan sebagai bukti pelaksanaan budaya sekolah ke kepala sekolah, (c) kepala sekolah menerima laporan dari wakil kepala sekolah kemudian mempelajarinya, kemudian laporan dari wakil kepala sekolah tersebut ditandatangani sebagai laporan pertanggungjawaban, (d) laporan pertanggungjawaban yang sudah disusun rapi tersebut diserahkan ke komite sekolah, (e) komite sekolah menerima laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh kepala sekolah untuk dipelajari. Setelah laporan disetujui, komite sekolah menandatangani laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pengesahan dalam pengawasan, (f) laporan yang sudah disahkan kepala sekolah dan komite sekolah, kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban dan diserahkan ke pengawas sekolah, (g) pengawas sekolah menerima laporan pertanggungjawaban kemudian dipelajari seperlunya, kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam penilaian kinerja atau DP3 kepala sekolah.

Dari data-data di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan budaya sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan Panduan BOS (2011:15-16) dan Tilaar (2006:64), di mana setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan dengan surat tugas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan tugas dan kewajiban oleh petugas yang ditunjuk sehingga petugas melakukan pekerjaan sesuai dengan surat tugas yang telah diterimanya. Setelah tugas selesai dilaksanakan, petugas atau penanggung jawab kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Adanya laporan pertanggungjawaban yang disusun dari guru melaksanakan kegiatan, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah menunjukkan adanya sistem pengawasan yang memadai, di mana pengawasan suatu kegiatan tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja tetapi minimal oleh 2 (dua) pejabat di atasnya, sehingga pengawasan dapat berfungsi secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan menghindari adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dapat berjalan seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka segala bentuk kesalahan atau kekurangan dalam program dapat dievaluasi dan dibenahi dalam kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

## Simpulan

Prosedur perencanaan budaya sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dalam penyusunan perencanaan budaya sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan perencanaan yang ditentukan dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007, di mana baik prosedur maupun warga sekolah yang terlibat dalam perencanaan budaya sekolah sudah berjalan dan berfungsi dengan baik. Prosedur pelaksanaan budaya sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena pelaksanaan budaya sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah direncanakan dengan prosedural/sistematis, sehingga pelaksanaannya pun tinggal menjalankan sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang sudah dituang dalam program kerja. Prosedur pengawasan budaya sekolah di SMP Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat adanya prosedur-prosedur yang sudah baik, di mana dengan adanya prosedur-prosedur yang baik maka fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik. Meskipun di sana-sini masih dijumpai adanya kekurangan atau kendala dalam pengelolaan budaya sekolah, tetapi dengan adanya evaluasi yang dilaksanakan secara periodik, maka pengelolaan akan bertambah baik dan sempurna untuk setiap tahunnya.

## Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SMA. 2008. *Panduan Penyusunan Program Kerja Rintisan SKM SBI*. <http://www.scribd.com/doc/12034605/5>. Diakses tanggal 2 Januari 2013
- Haryati, S. 2011. *Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan dengan Menerapkan Prosedur Mutu di Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Kota Magelang*. Disertasi. Semarang: Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Milles, BM and Huberman, A.M. 1992. *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L.J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2011 tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta:Depdiknas.
- Permendiknas RI Nomor19 tahun 2007 tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta : Depdiknas.
- Tilaar, HAR. 2006. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.